

DAFTAR PUTSTAKA

A. Buku

Abdullah, Rozali, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdurrasyid, Priyatna H., 2002, *Abritrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimliy, 2009, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2015, *Penguatan Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Azra, Azumardy, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Prenanda Media, Jakarta.

Fadjar, A. Mukhtie, 2003, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-TRANS, Malang.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gaffar, Janedjri M., 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.

Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung

H. S., H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

- Latif, Abdul, Muhammad Syarif Nuh, dkk, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Marbun S.F., 2003, *Bagaimana Menegakan Pemilu*, Muliasari, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mawardi, Irvan, 2014, *Dinamika Sengketa Administrasi di Pemilukada*, Rangkang Education Yogyakarta,
- MD., Mahfud, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerdiono, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Palguna, I Dewa Gede, 2018, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemiliran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Rihih, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum, Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmoderenisme)*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sodikin, 2014, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata, Bekasi.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 1991, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suswanto, Gunawan, 2015, *Pengawasam Pemilu Partisipatif, Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan I, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Aandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wardani, Kunthi Dyah, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Wibowo, Arif, 2013, *Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pilkada*, Konstitusi Press, Jakarta.

Yahyanto, Lukman Santoso Az, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135).

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1338).

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1404).

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1748).

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1749).

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291).

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013.

Putusan Nomor 92/B/2015/PT.TUN.MKS.

Putusan Nomor 13 K/TUN/2016

D. Hasil Penelitian Tesis, Skripsi, Jurnal, Makalah, Internet

Jangi, Adb Rahum H., “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Negara Demokrasi berdasarkan hukum”, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Mas Muhammad Gibran Sesunan, “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, Penulisan Hukum *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2013.

Mubarq, Zaki, 2013, “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung.

E. Jurnal

Ardiansyah, Muhamad, 2014, “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Negeri”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 Desember 2014.

Asshidiqie, Jimly, 2013, *Pengenalan Dewan Penyelenggara Pemilu untuk Penegakan Hukum, Makalah*, disampaikan dalam Forum rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta.

Chakim, M. Luthfi, 2014, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni.

Laksono, Fajar, dkk, 2013. “Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4 Desember.

Laksono, Fajar, 2014, “Aspek Keadilan dalam sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No. 1 .

F. Internet

Nasakah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang merupakan *raison de etre* lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Lihat www.dpr.go.id, RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, 4 sabbtu 2019, Pukul 14.20 WIB, dapat diakses pada <http://www.dpr.go.id/id/ruu/Korpolkam/Komisi2/138/RUU-Perubahan-Atas-uu-No.-22-Tahun-2007-Tentang-Penyelenggara-Pemilu>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/06/13402641/aturan-terkait-putusan-dkpp-dalam-uu-pemilu-digugat-ke-mk?page=al>

<http://kpu.blitarkab.go.id/sejarah-kpu/>

<http://pl.bawaslu.go.id/pages%20/read/sejarah-pengawasan-pemilu>.

<http://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>.